

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM PADA UMKM OTAK-OTAK DI
KAMPUNG SUNGAI ENAM LAUT KABUPATEN BINTAN**

Andhini Syahrani, Wahjoe Pangestoeti , Reza Gemilang
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Maritim Raja Ali Haji
Email : andhinisyahrani13@gmail.com, wpangestoeti@yahoo.com,
rezagemilang@umrah.ac.id

ABSTRAK

UMKM otak-otak merupakan ikon kuliner unggulan Kabupaten Bintan yang berbasis pada potensi perikanan lokal di Kampung Sungai Enam Laut. Namun, perkembangannya masih terkendala keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, dan ketidakmerataan penjualan, sehingga diperlukan evaluasi kebijakan pemberdayaan yang tepat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Daerah serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan lokasi di Kelurahan Sungai Enam Laut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap informan dari DKUPP, Kelurahan, pelaku UMKM, dan masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan bantuan NVivo 15, menggunakan teori utama evaluasi kebijakan Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan) serta teori implementasi Van Meter dan Van Horn. Hasil menunjukkan kebijakan telah berjalan cukup efektif. Program bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan berdampak positif pada kapasitas usaha. Efisiensi proses dinilai cukup mudah, namun prosedur birokrasi masih memakan waktu. Kecukupan program membantu, tetapi belum memenuhi kebutuhan modal dan peralatan spesifik. Pemerataan akses sudah baik, responsivitas pemerintah tergolong tinggi, dan ketepatan sasaran sesuai dengan karakteristik usaha lokal. Faktor pendukung utama adalah koordinasi, komunikasi, dan komitmen pelaksana, sedangkan hambatan utama adalah panjangnya prosedur administrasi dan keterbatasan sumber daya.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pemberdayaan UMKM, UMKM Otak-Otak, Kabupaten Bintan.

ABSTRACT

Otak-otak MSMEs are a leading culinary icon of Bintan Regency based on local fishery potential in Kampung Sungai Enam Laut. Their development is constrained by limited capital, low digital literacy, and uneven sales distribution, necessitating a targeted policy evaluation. This study evaluates MSME empowerment policies by the Regional Government and analyzes supporting and inhibiting factors. Using a descriptive qualitative approach in Sungai Enam Laut Village, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation from DKUPP, Village officials, MSME actors, and the community. Data analysis utilized Miles and Huberman's interactive model with NVivo 15, applying Dunn's Policy Evaluation Theory (effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness) and Van Meter and Van Horn's Implementation Theory. The results show that the empowerment policy has been quite effective. Assistance, training, and mentoring positively impacted business capacity. Process efficiency is relatively easy, though bureaucratic procedures still consume time. Adequacy is helpful but has not met needs for capital and specialized equipment. Equity is good, government responsiveness is high, and targeting aligns with local business characteristics. The main supporting factors are coordination, communication, and commitment, while the main obstacles are lengthy procedures and limited resources.

Keywords: Policy Evaluation, MSME Empowerment, Otak-Otak MSMEs, Bintan Regency.

PENDAHULUAN

Gambar 1. 1 Peta Kelurahan Sungai Enam



Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama diakui sebagai pilar fundamental perekonomian Indonesia yang memiliki ketahanan dan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Data terkini dari Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional konsisten di atas 60% dengan kemampuan menyerap tenaga kerja mencapai 97% dari total angkatan kerja pada tahun 2023 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023).

Pemberdayaan UMKM pada hakikatnya tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan (Susanto et al., 2025).

Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah usaha yang aktif, tetapi juga dari kemampuan pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, mengembangkan inovasi produk, serta mempertahankan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Irawan, 2020).

Di Kabupaten Bintan khususnya daerah Sungai Enam, ikan, sotong bahkan gonggong diolah sedemikian rupa sehingga menjadi makanan yang enak dikonsumsi dengan bahan dasar yang tentunya dicampur dengan bahan lainnya sehingga menghasilkan makanan yang dinamakan otak-otak. Otak-otak merupakan makanan ringan yang menggunakan daun kelapa sebagai

wadahnya lalu dibakar sehingga matang dan bisa dikonsumsi baik untuk sehari-hari atau dijadikan buah tangan.

Persoalan ini diperparah dengan masih terbatasnya kapasitas kelembagaan UMKM otak-otak yang sangat bergantung pada interaksi antara pengelola, kelompok, dan masyarakat, serta dukungan instrumental dan informasional dari pemerintah kelurahan dan dinas terkait. Kondisi ini mengakibatkan produk otak-otak sebagai potensi unggulan lokal belum mampu berkembang secara optimal dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Penelitian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM, baik yang bersifat nasional maupun daerah, dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM di tingkat akar rumput, khususnya dalam konteks pelestarian dan pengembangan kuliner tradisional sebagai aset budaya dan ekonomi daerah di Kabupaten Bintan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM otak-otak di Kelurahan Sungai Enam Laut, Kabupaten Bintan. Evaluasi dilakukan menggunakan teori Dunn, sedangkan teori Van Meter dan Van Horn digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian berfokus pada program pembinaan, pelatihan, pendampingan, fasilitasi usaha, bantuan sarana, dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas serta daya saing UMKM. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, serta berbagai dokumen kebijakan dan literatur terkait, dengan informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses reduksi dibantu dengan NVivo melalui tahapan coding dan pengelompokan tema agar analisis lebih sistematis.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kelurahan Sungai Enam

Kelurahan Sungai Enam merupakan wilayah pesisir di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, dengan luas sekitar 23,93 km² dan termasuk dalam kawasan perkotaan Kijang. Kelurahan Sungai Enam dinilai representatif sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi ekonomi yang besar, jumlah pelaku UMKM yang tinggi, serta adanya intervensi kebijakan pemerintah. Meskipun produk otak-otak memiliki cita rasa khas dan daya saing tinggi, para pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal usaha, kualitas pengemasan yang masih tradisional, rendahnya pemasaran digital, dan ketidakstabilan pasokan serta harga bahan baku ikan.

Program Pemberdayaan UMKM Otak-Otak di Kelurahan Sungai Enam

A. Program Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi

Untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk, DKUKP Kabupaten Bintan bersama Pemerintah Kelurahan melakukan penyaluran bantuan fisik kepada kelompok UMKM otak-otak. Bantuan yang diberikan mencakup peralatan modern, seperti mesin penggiling daging berkapasitas besar, alat pemanggang yang lebih higienis, serta freezer atau lemari pendingin untuk menjaga kesegaran bahan baku dan memperpanjang umur simpan produk. Program ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha beralih dari peralatan manual ke semi-otomatis, sehingga waktu produksi menjadi lebih singkat dan hasil olahan lebih konsisten.

B. Program Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Selain bantuan fisik, pemerintah daerah secara periodik mengadakan pelatihan yang menyasar para pelaku UMKM otak-otak. Pelatihan yang diberikan antara lain:

1. Pelatihan Manajemen Usaha dan Pembukuan Sederhana, untuk membantu pelaku usaha

memisahkan antara keuangan pribadi dan modal usaha, serta merencanakan pengembangan bisnis.

2. Pelatihan *Packaging* dan *Branding*, di mana pelaku usaha diajarkan untuk mengemas produk otak-otak dengan lebih menarik, higienis, dan tahan lama menggunakan kemasan vakum (*vacuum sealing*).
3. Pelatihan *Digital Marketing*, berupa bimbingan teknis dalam memanfaatkan platform media sosial (Instagram, Facebook, dan aplikasi pengiriman makanan) untuk memperluas jangkauan pemasaran di luar pasar lokal.

C. Program Pendampingan Legalitas dan Administrasi Usaha

Salah satu hambatan utama yang kerap dihadapi UMKM adalah minimnya legalitas usaha. Menyikapi hal ini, DKUKP dan pihak kelurahan secara aktif melakukan pendampingan langsung dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pengurusan Sertifikat Halal, serta pengurusan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga).

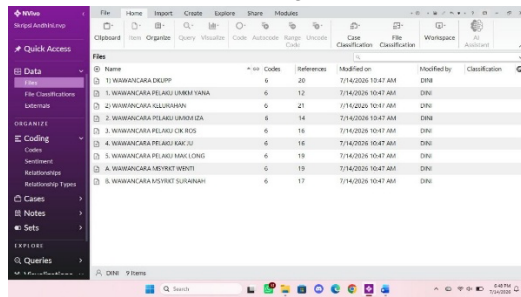
D. Mekanisme Pelaksanaan dan Penyaluran Program

Pelaksanaan program pemberdayaan ini dilakukan secara kolaboratif. Pihak kelurahan berperan melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima manfaat berdasarkan kriteria tertentu. Sementara itu, DKUKP bertindak sebagai penyedia anggaran, fasilitator pelatihan, dan pengawas teknis pelaksanaan di lapangan. Program umumnya dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran dengan evaluasi berkala setiap triwulan untuk mengukur tingkat partisipasi dan kendala yang dihadapi saat penerapan.

Hasil Analisis Data Menggunakan NVivo

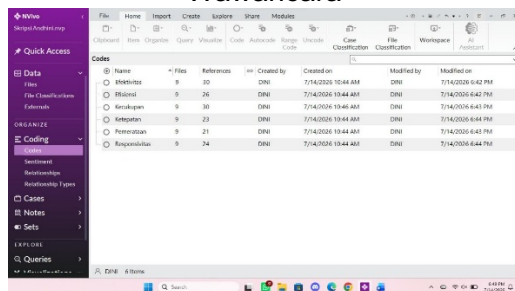
Sebelum melakukan analisis berdasarkan kriteria penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan pengolahan data wawancara menggunakan aplikasi NVivo 15. Pengolahan data dilakukan melalui proses *coding* terhadap hasil wawancara yang telah ditranskripsikan.

Gambar 4. 1 Pengimputan File Kedalam NVivo



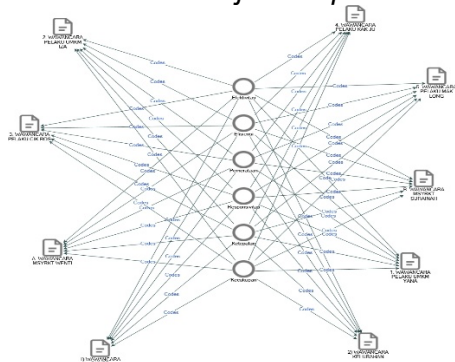
Data kemudian dikelompokkan ke dalam *node* berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Gambar 4. 2 Pengkodean Data Wawancara



Berdasarkan Gambar 4.3 dibawah, menunjukkan *Project Map* hasil pengkodean (*coding*) data wawancara menggunakan aplikasi NVivo. Pada gambar tersebut terlihat hubungan antara sumber data wawancara dengan *node* atau kategori analisis yang disusun berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, ketepatan, dan kecukupan.

Gambar 4. 3 *Project Maps* NVivo



Hasil pemetaan tersebut menunjukkan bahwa setiap kriteria memperoleh data dari berbagai kelompok

informan sehingga analisis penelitian tidak hanya didasarkan pada satu sumber informasi, melainkan melalui proses triangulasi data.

Gambar 4. 4 Word Cloud



Gambar 4.4 merupakan hasil analisis *Word Cloud* menggunakan aplikasi NVivo yang menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam keseluruhan transkrip wawancara. Semakin besar ukuran suatu kata pada *Word Cloud*, semakin tinggi frekuensi kemunculan kata tersebut dalam data hasil wawancara.

Berdasarkan gambar tersebut, kata "pemberdayaan" dan "pengembangan" merupakan kata yang paling dominan muncul. Selain itu, terdapat beberapa kata lain yang memiliki frekuensi cukup tinggi, seperti "responsivitas", "pendampingan", "karakteristik", "administrasi", "dikembangkan", "difasilitasi", dan "berkoordinasi". Dominasi kata-kata tersebut menunjukkan bahwa pembahasan informan banyak berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan UMKM, upaya pengembangan usaha, pendampingan kepada pelaku UMKM, serta koordinasi antar pihak dalam implementasi kebijakan. **Evaluasi Kebijakan PP Nomor 7 Tahun 2021 dalam Pemberdayaan UMKM Otak-Otak di Sungai Enam Laut Efektivitas**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riawati Elyta selaku Kabid Usaha Mikro DKUPP Kabupaten Bintan pada tanggal 12 Februari 2026, diketahui bahwa tujuan pemberdayaan UMKM otak-otak dinilai telah tercapai dengan cukup baik. Informan menyampaikan bahwa:

"Kalau dari sisi kami sebagai dinas, tujuan pemberdayaan sudah cukup tercapai. Program yang dilaksanakan tidak hanya menyasar satu kelompok usaha saja, tetapi seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Bintan, termasuk UMKM otak-

otak. Sejauh ini program tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha mereka." (Wawancara 12 Februari 2026).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pemberdayaan UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 telah memberikan manfaat, meskipun masih terdapat pelaku usaha yang belum memperoleh seluruh bentuk pemberdayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, kriteria efektivitas menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam pemberdayaan UMKM otak-otak di Sungai Enam Laut telmelalui program pemberdayaan yang diberikan pemerintah mampu membantu pengembangan usaha melalui bantuan sarana usaha, pelatihan, dan pendampingan.

Efisiensi

Dalam penelitian ini, kriteria efisiensi digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan UMKM otak-otak di Sungai Enam Laut dari segi kemudahan prosedur, pengelolaan sumber daya, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

"Program yang kami laksanakan diperuntukkan bagi seluruh pelaku UMKM. Untuk UMKM otak-otak sendiri, kami pernah memberikan bantuan showcase pada tahun 2024 melalui anggaran yang tersedia saat itu. Jadi pengelolaan anggaran disesuaikan dengan program dan kebutuhan yang telah direncanakan." (Wawancara 12 Februari 2026).

Berdasarkan hasil penelitian, kriteria efisiensi menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan UMKM otak-otak di Sungai Enam Laut telah dilaksanakan. Sebagian besar pelaku usaha menilai proses pendaftaran dan pelaksanaan program tidak menyulitkan serta didukung oleh koordinasi yang baik antara pemerintah dan pelaku UMKM. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa lamanya proses administrasi dan penyaluran bantuan yang memerlukan perhatian lebih lanjut agar pelaksanaan program menjadi lebih efisien.

Kecukupan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riawati Elyta selaku Kabid Usaha Mikro DKUPP Kabupaten Bintan pada tanggal 12 Februari 2026, diketahui bahwa program pemberdayaan yang diberikan kepada UMKM otak-otak dinilai cukup membantu kebutuhan usaha. Informan menyatakan:

"Kalau dari sisi sarana usaha, program yang diberikan cukup membantu. Misalnya bantuan showcase yang dapat digunakan untuk menjaga kualitas produk sekaligus mendukung pemasaran produk mereka." (Wawancara 12 Februari 2026).

Berdasarkan hasil penelitian, kriteria kecukupan menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM otak-otak telah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pelaku usaha melalui bantuan sarana usaha, pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi sertifikasi.

Pemerataan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riawati Elyta selaku Kabid Usaha Mikro DKUPP Kabupaten Bintan pada tanggal 12 Februari 2026, diketahui bahwa seluruh program pemberdayaan yang dilaksanakan terbuka bagi seluruh pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Informan menyatakan:

"Pada prinsipnya seluruh program yang ada di dinas terbuka bagi seluruh pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan. Program tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok tertentu, tetapi berlaku bagi seluruh UMKM di Kabupaten Bintan." (Wawancara 12 Februari 2026).

Berdasarkan hasil penelitian, kriteria pemerataan menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM otak-otak di Sungai Enam Laut telah berjalan dilaksanakan. Seluruh pelaku usaha pada umumnya memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses informasi, mengikuti program, dan menerima bantuan yang disediakan pemerintah. Meskipun terdapat pandangan bahwa bantuan perlu diprioritaskan kepada pelaku usaha yang aktif, secara keseluruhan tidak ditemukan adanya ketimpangan yang berarti dalam

pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Sungai Enam Laut.

Responsivitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riawati Elyta selaku Kabid Usaha Mikro DKUPP Kabupaten Bintan pada tanggal 12 Februari 2026, diketahui bahwa dinas berupaya menindaklanjuti setiap aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh pelaku UMKM sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Informan menyatakan:

"Apabila terdapat aspirasi atau keluhan yang disampaikan pelaku UMKM, kami akan berupaya menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada pada dinas." (Wawancara 12 Februari 2026).

Berdasarkan hasil penelitian, kriteria responsivitas menunjukkan bahwa pemerintah telah responsif dalam menanggapi kebutuhan, aspirasi, dan keluhan pelaku UMKM otak-otak di Sungai Enam Laut. Hal tersebut terlihat dari adanya komunikasi yang baik antara pemerintah, kelurahan, dan pelaku usaha serta kesesuaian program dengan kebutuhan yang dihadapi UMKM. Meskipun demikian, pemerintah masih perlu meningkatkan intensitas pendampingan dan kunjungan lapangan agar kebutuhan pelaku usaha dapat dipahami secara lebih mendalam dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

Ketepatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riawati Elyta selaku Kabid Usaha Mikro DKUPP Kabupaten Bintan pada tanggal 12 Februari 2026, diketahui bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan telah ditujukan kepada pelaku usaha yang memang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usahanya. Informan menyatakan:

"Menurut kami program yang diberikan sudah cukup tepat sasaran karena ditujukan kepada pelaku UMKM yang memang menjalankan usaha dan membutuhkan dukungan untuk pengembangan usahanya." (Wawancara 12 Februari 2026).

Berdasarkan hasil penelitian, kriteria ketepatan menunjukkan bahwa

implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam pemberdayaan UMKM otak-otak di Sungai Enam Laut telah berjalan dengan baik. Program yang diberikan dinilai sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan karakteristik usaha otak-otak yang berkembang di wilayah tersebut. Selain itu, sasaran program pada umumnya telah tepat karena ditujukan kepada pelaku UMKM yang menjalankan usaha dan membutuhkan dukungan untuk pengembangannya. Oleh karena itu, kriteria ketepatan dapat dikategorikan telah terpenuhi dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM otak-otak di Sungai Enam Laut.

Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Kebijakan PP Nomor 7 Tahun 2021

Standar dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DKUPP Kabupaten Bintan, tujuan pemberdayaan UMKM telah dilaksanakan melalui berbagai program yang menjangkau seluruh pelaku UMKM, termasuk UMKM otak-otak di Sungai Enam Laut. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pelatihan, pembinaan, pendampingan, sertifikasi, serta bantuan sarana usaha yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha pelaku UMKM.

"Kalau dari sisi kami sebagai dinas, tujuan pemberdayaan sudah cukup tercapai. Program yang dilaksanakan tidak hanya menjangkau satu kelompok usaha saja, tetapi seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Bintan, termasuk UMKM otak-otak. Sejauh ini program tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha mereka." (Wawancara 12 Februari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa standar dan tujuan kebijakan dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 pada dasarnya telah dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh DKUPP Kabupaten Bintan serta didukung oleh Kelurahan Sungai Enam. Tujuan pemberdayaan UMKM telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha otak-otak.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DKUPP Kabupaten Bintan, pemerintah telah menyediakan berbagai bentuk sumber daya untuk mendukung pemberdayaan UMKM. Dukungan tersebut diberikan melalui program pelatihan, pendampingan, sertifikasi, serta bantuan sarana usaha yang disesuaikan dengan program dan anggaran yang tersedia.

"Program yang kami laksanakan diperuntukkan bagi seluruh pelaku UMKM. Untuk UMKM otak-otak sendiri, kami pernah memberikan bantuan showcase pada tahun 2024 melalui anggaran yang tersedia saat itu. Jadi pengelolaan anggaran disesuaikan dengan program dan kebutuhan yang telah direncanakan." (Wawancara 12 Februari 2026).

Komunikasi Antar Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi antara DKUPP Kabupaten Bintan dan Kelurahan Sungai Enam telah berjalan dengan baik. Kelurahan berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM dalam menyampaikan informasi mengenai program, bantuan, maupun berbagai kebutuhan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Adanya koordinasi tersebut membantu memperlancar pelaksanaan program pemberdayaan di tingkat masyarakat.

"Koordinasi tetap kami lakukan apabila ada kebutuhan atau aspirasi dari pelaku UMKM yang perlu disampaikan. Dalam hal ini kelurahan menjadi perantara komunikasi antara pelaku usaha dengan dinas terkait." (Wawancara 5 Februari 2026).

Meskipun terdapat kendala berupa waktu penyampaian informasi dan aspirasi yang tidak selalu berlangsung secara langsung, secara umum komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM otak-otak di Sungai Enam Laut berjalan dengan baik. Koordinasi yang terjalin antara DKUPP Kabupaten Bintan, Kelurahan Sungai Enam, dan pelaku UMKM telah mendukung kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan. Oleh karena itu, variabel komunikasi antar organisasi dapat

dikategorikan sebagai faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 terhadap pemberdayaan UMKM otak-otak di Sungai Enam Laut.

Karakteristik Badan Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara, DKUPP Kabupaten Bintan memiliki peran utama dalam merancang dan melaksanakan berbagai program pemberdayaan UMKM. Program-program tersebut meliputi pelatihan, pembinaan, pendampingan, sertifikasi usaha, hingga pemberian bantuan sarana usaha kepada pelaku UMKM. Sementara itu, Kelurahan Sungai Enam berperan dalam mendukung proses administrasi, menyampaikan informasi program, serta menjembatani komunikasi antara pelaku UMKM dengan pemerintah daerah.

"Peran kelurahan itu lebih kepada mendukung secara administrasi. Misalkan ada bantuan dari dinas terkait, kami membantu menyiapkan surat-surat yang dibutuhkan seperti surat keterangan kelompok dan administrasi lainnya supaya mempermudah mereka mendapatkan bantuan." (Wawancara 5 Februari 2026).

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian, Sungai Enam Laut merupakan salah satu wilayah yang dikenal sebagai sentra produksi otak-otak di Kabupaten Bintan. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan potensi hasil perikanan sebagai bahan baku utama dalam kegiatan usaha. Kondisi tersebut menjadi modal yang mendukung perkembangan UMKM otak-otak karena ketersediaan bahan baku relatif mudah diperoleh dan usaha yang dijalankan sesuai dengan potensi daerah setempat.

"Sangat sesuai. Karena masyarakat Sungai Enam, khususnya Sungai Enam Laut, banyak yang memanfaatkan hasil perikanan. Jadi usaha otak-otak ini memang sesuai dengan potensi dan kondisi masyarakat yang ada di sini." (Wawancara 5 Februari 2026).

Disposisi Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara, pihak DKUPP Kabupaten Bintan

menunjukkan komitmen yang baik dalam mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai program pemberdayaan.

“Apabila terdapat aspirasi atau keluhan yang disampaikan pelaku UMKM, kami akan berupaya menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada pada dinas.” (Wawancara 12 Februari 2026).

Pembahasan

Pembahasan Kriteria Efektivitas

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM dalam pemberdayaan UMKM otak-otak di Sungai Enam Laut Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa tujuan kebijakan telah mulai tercapai, meskipun belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan

Temuan tersebut selanjutnya dapat dijelaskan melalui teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh tercapainya tujuan kebijakan, tetapi juga oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial ekonomi, serta sikap kelompok sasaran.

Pembahasan Kriteria Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam pemberdayaan UMKM otak-otak di Sungai Enam Laut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program pemberdayaan telah berjalan dengan cukup efisien. Hal ini terlihat dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, seperti pelatihan, pendampingan, fasilitasi legalitas usaha, dan promosi produk yang dapat diakses oleh pelaku UMKM tanpa dipungut biaya.

Pembahasan Kriteria Kecukupan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam pemberdayaan UMKM otak-otak di Sungai Enam Laut Kabupaten Bintan

menunjukkan bahwa berbagai program yang telah dilaksanakan pemerintah daerah mampu memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, seperti peningkatan pengetahuan melalui pelatihan, kemudahan dalam pengurusan legalitas usaha, serta dukungan promosi produk.

Apabila ditinjau berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), tingkat kecukupan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pembahasan Kriteria Pemerataan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam pemberdayaan UMKM otak-otak di Sungai Enam Laut Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa berbagai program pemberdayaan telah diupayakan untuk menjangkau seluruh pelaku UMKM.

Apabila dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial masyarakat. Komunikasi yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku UMKM menyebabkan informasi mengenai program pemberdayaan tidak diterima secara merata.

Pembahasan Kriteria Responsivitas

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam pemberdayaan UMKM otak-otak di Sungai Enam Laut Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya merespons kebutuhan pelaku UMKM melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas usaha, serta promosi produk pada berbagai kegiatan pameran. Berbagai program tersebut dinilai memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengelola usaha.

Pembahasan Kriteria Ketepatan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam pemberdayaan UMKM otak-otak di Sungai Enam Laut Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa program-program yang dilaksanakan pemerintah daerah telah diarahkan kepada kelompok sasaran yang tepat, yaitu pelaku UMKM otak-otak sebagai bagian dari usaha mikro yang menjadi fokus kebijakan pemberdayaan.

Apabila ditinjau berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), ketepatan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan standar dan sasaran kebijakan, karakteristik badan pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini, standar dan sasaran kebijakan telah diterjemahkan

Tabel 4. 1 Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi PP No. & Tahun 2021 Berdasarkan Indikator Van Meter dan Van Horn (1975)

Faktor		Temuan
Faktor Pendukung	Standar dan tujuan	Tujuan program dipahami pelaksana
	Sumber daya	Dukungan SDM dan fasilitas
	Komunikasi	Koordinasi antarinstansi berjalan baik
	Disposisi Pelaksana	Komitmen pelaksana tinggi
Faktor Penghambat	Sumber daya	Keterbatasan anggaran
	Lingkungan ekonomi	Modal usaha UMKM masih terbatas
	Komunikasi	Tidak semua UMKM aktif mengikuti sosialisasi

	Karakteristik sasaran	Literasi digital masih rendah
--	-----------------------	-------------------------------

Sumber: Olahan data penulis, 2026.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam pemberdayaan UMKM otak-otak di Sungai Enam Laut, Kabupaten Bintan, dapat dinilai cukup efektif berdasarkan teori evaluasi kebijakan Dunn. Program pemberdayaan telah memberikan dampak positif melalui bantuan sarana usaha, pelatihan, pendampingan, dan pembinaan yang meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Dari aspek efisiensi, pelaksanaan program relatif mudah meskipun masih terdapat prosedur administrasi yang cukup panjang.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, efektivitas pelaksanaan kebijakan didukung oleh kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, dukungan anggaran, komunikasi yang baik antarpihak, pembagian tugas yang jelas, kondisi sosial ekonomi yang mendukung, serta komitmen pelaksana kebijakan. Adapun faktor penghambat meliputi prosedur administrasi yang panjang, keterbatasan bantuan yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan spesifik pelaku UMKM, serta perlunya tambahan peralatan produksi, modal usaha, dan peningkatan intensitas pendampingan

Saran

Kelurahan Sungai Enam juga diharapkan memperkuat perannya sebagai fasilitator antara pemerintah dan pelaku UMKM melalui penyebaran informasi program secara merata, peningkatan pendataan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha yang baru merintis agar memperoleh akses yang setara terhadap program pemberdayaan.

Bagi pelaku UMKM otak-otak, disarankan untuk memanfaatkan program pemberdayaan secara maksimal guna meningkatkan kualitas produk, kapasitas usaha, inovasi, pemasaran, dan daya

saing. Sementara itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan menggunakan teori, pendekatan, atau lokasi penelitian yang berbeda .

569c2f3f39d44fe2db43_16520790
47.pdf

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurohim, D. (2021). *Pengembangan UMKM: Kebijakan Strategi, Digital Marketing dan Model Bisnis UMKM*. Pt. Refika Aditama.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Hadi, S., Soetriono, Subekti, S., & Aji, J. M. M. (2025). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir: Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (A. Juansa (ed.); 1st ed.). PT. Star Digital Publishing.
- Hasibuan, R. P. A., Harahap, A. R., & Rahmah, R. A. (2025). *Pengembangan UMKM Berbasis Budaya Sebagai Pondasi Ekonomi* (A. F. Rohman & A. F. Qohar (eds.); 1st ed.). PT. Penerbit Qriset Indonesia.
- Junianto, Eka, T., Nayyara, N., Anggraeni, N., Ma'arif, S., & Maharani, T. A. (2026). *Pangan Pesisir dan Daya Tahan UMKM Lokal: Cerita Inovasi Kerupuk Ikan di Pantai Selatan Jawa Barat* (1st ed.). PT. Revormasi jangkar Philosophy.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & M.Ohorella, H. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik* (A. K. Muzakkir (ed.); 1st ed.). Humanities Genius.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (19th ed.). CV. ALFABETA.
https://digi-lib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75

Jurnal

- Amory, J. D. S., Mudo, M., & J, R. (2025). Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur tentang Perubahan Perilaku Belanja di Era Internet.
- Irawan, D. (2020). Peningkatan Daya Saing Usaha Micro Kecil dan Menengah Melalui Jaringan Usaha. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(2), 103–116.
- Khumairo, H., Hersiyah, & Mashudi. (2025). The Role of MSMEs in Driving Economic Growth and Income Equality in Indonesia. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 22–32.
<https://doi.org/10.55043/ekonomipedia.v3i1.274>
- Luange, J., & Triakoly, K. (2025). Peran UMKM Dalam Menggerakkan Ekonomi Indonesia. *IQRA: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 4(2).
<https://jurnal.iai-assiddiq.ac.id/index.php/iqra/article/view/64>
- Zulkarnain, Raharjo, K. M., Purwito, L., & Choiri, U. D. (2025). *Institutional Capacity of MSMEs in the Otak-Otak Culinary Household Industry in the Business Development of the Community of Sei Enam Kijang Village Bintan Regency, Riau Islands Province* (pp. 20–28).
https://doi.org/10.2991/978-2-38476-370-2_4

Dasar Hukum

- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau. (2022). *Profil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Produk Lokal Unggulan Daerah Kepulauan Riau*.

Presiden Republik Indonesia. (2013).
*Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro Kecil
dan Menengah.*
[https://peraturan.bpk.go.id/Details/
5349/pp-no-17-tahun-2013](https://peraturan.bpk.go.id/Details/5349/pp-no-17-tahun-2013)

Presiden Republik Indonesia. (2021).
*Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan Koperasi dan
UMKM.*
[https://peraturan.bpk.go.id/Details/
73586/perpres-no-16-tahun-2018](https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018)

Bupati Bintan. (2022). Peraturan Bupati
Bintan Nomor 43 Tahun 2022
tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko, Perizinan Non
Berusaha, dan Nonperizinan
kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bintan. Pemerintah
Kabupaten Bintan. JDIH Kabupaten
Bintan